



# Targetkan Kemiskinan Turun di 2027

Status Istimewa, DPRD DIY: Harus Dikaji

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Angka kemiskinan di DIY saat ini masih di atas nasional. Angka kemiskinan tahun lalu mencapai 10,6 persen di mana nasional mencapai 8,25.

Capaian itu mendapatkan perhatian serius dari DPRD DIY. Apalagi, status istimewa yang membuat Yogyakarta tak memilih gubernur. Tapi, menetapkan gubernur.

"Budaya dan karakter Yogyakarta berbeda dengan daerah lain. Kita adalah daerah istimewa, dengan mekanisme penetapan, bukan pemilihan. Seharusnya kita bisa lebih baik dari wilayah lain. Dengan keistimewaan ini, DIY pasti lebih mudah untuk bergerak

bersama menjawab tantangan pembangunan," kata Ketua DPRD DIY Nuryadi saat Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2027 di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (12/2/2026).

Nuryadi menegaskan, isu kemiskinan menjadi perhatian serius penyusunan RKPD 2027. Sebab, tahun depan ini merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027.

"Angka kemiskinan di DIY masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

■ **Baca TARGETKAN... Hal II**

# Targetkan Kemiskinan Turun di 2027

sambungan dari hal Joglo Jogja

Ini harus menjadi kajian yang sungguh-sungguh agar ke depan dapat kita tekan secara nyata," tegas Nuryadi.

Nuryadi menambahkan, DPRD DIY terus membangun komunikasi dengan sekretaris daerah. Ini agar setiap kebijakan dan program benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat Yogyakarta secara luas, bukan kepentingan perorangan.

"Kami selalu berkomunikasi agar yang kita utamakan adalah masyarakat Yogyakarta. Kami berharap teman-teman eksekutif dapat melaksanakan kegiatan

sesuai rencana. Jika ada kendala, harus dikomunikasikan dengan baik agar dapat dicarikan solusi bersama," katanya.

Sesuai rancangan RKPD 2027, pertumbuhan ekonomi DIY termasuk yang ditargetkan tinggi dalam kerangka RPJMN. Untuk itu, diperlukan penguatan sektor-sektor penopang seperti pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif agar mampu menjaga stabilitas dan kualitas pertumbuhan. Inflasi juga menjadi perhatian karena menunjukkan tren kenaikan bulanan meskipun masih dalam rentang target.

Dari sisi ketenagakerjaan, angka pengangguran DIY secara umum berada di bawah rata-rata nasional dan menunjukkan tren menurun. Tapi, di Kabupaten Kulon Progo diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Khusus untuk angka kemiskinan, konsentrasi lebih banyak di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan. Ketimpangan pendapatan juga menjadi isu strategis yang perlu ditangani melalui kebijakan yang lebih merata dan inklusif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY tercatat,

berada di posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta. Ini ditopang sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi fisik dan keuangan hingga akhir 2025 dinilai cukup baik meskipun masih terdapat sejumlah catatan. Struktur pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer.

Sementara belanja pegawai mengalami kenaikan dari 28 persen menjadi 35,2 persen. Sehingga diperlukan efisiensi dan optimalisasi pendapatan daerah. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005